

## Daftar Pustaka

### Buku:

Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, 2010, Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia, cet. I, Yarsif Watampone, Jakarta, hlm 117.

Arief Gosita, 2002, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: Akademindo Pressindo, hlm 3.

Arif Gosita, 2004, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, hlm. 12.

Barda Nawawi Arief, 2010, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Ed. II, Cet. V, Kencana, Jakarta, hlm 137.

Chairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cet. I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.75.

Darwan Prints, 2002, Hukum Anak Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 2.

Didik M. Arief Mansur, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 11- 24.

Didik Endro Purwoleksono, 2014, Hukum Pidana, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 63.

Emeliana Krisnawati, 2005, Aspek Hukum Perlindungan Anak, CV Utama, Bandung, hlm 5.

E. Utrecht, 1994, Rangkaian Sari Kuliah HUKUM Pidana I, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hlm 260.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2012, Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Penerbit Storia Grafika, hlm. 250.

Harrys Pratama Teguh, 2018, Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana, Yogyakarta: Andi Offset, hlm 2.

H. Setiyono, 2013, Teori – Teori dan Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Cet. I, Banyumedia Publishing, hlm. 30

Jimly Asshidique dan M. Ali Safa'at, 2006, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta: Konpress, hlm 61.

Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, Dasar – Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Cet I, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 192-193.

Laurensius Arliman S dan Gokma Toni Parlindungan S, Politik Hukum Perlindungan Anak, Yogyakarta: CV Budi Utama, hlm. 13.

P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cet. III, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 397

Peter Mahmud Marzuki, 2009, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 158.

Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 53.

Titon Slamet Kurnia, 2005, Reparasi terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 6-7.

Van Bemmelen, Ons Strafrecht I, hlm 62.

Widyo Pramono, 2012, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta, Cet.I, Alumni, Bandung, hlm 83.

### **Perundang – Undangan:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang - Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang.

